

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH
TSANAWIYAH MATHLA'UL ANWAR
KEDONDONG PESAWARAN**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam**



Oleh:

**ID'HA ILHAMI
NPM: 1886131046**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM MAGISTER ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
2021/1442**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH
TSANAWIYAH MATHLA'UL ANWAR
KEDONDONG PESAWARAN**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh:

**ID'HA ILHAMI
NPM: 1886131046**



**Pembimbing I : Dr. Oki Darmawan., M. Pd
Pembimbing II : Andi Thahir., M.A.Ed.D**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM MAGISTER ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
2021/1442**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ID'HA ILHAMI

NPM : 18861310045

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: "MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH TSANAWIYAH MATHLA'UL ANWAR KEDONDONG PESAWARAN" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 07 September 2020

Menyatakan,

Id'ha Ilhami

Id'ha Ilhami



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl Yulius Usman Labuhanraju Kedaton Telp. (0721) 787392. Fax (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

**Judul Tesis : MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH
TSANAWIYAH MATHLA'UL ANWAR KEDONDONG
PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : ID'HA ILHAMI

NPM : 1886131046

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

**Telah diujikan dalam ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 30 Desember 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Dr. Oki Darmawan, M.Pd
NIP. 197610302005011001

Pembimbing II

Dr. Andi Thahir, M.Pd
NIP. 1976604270200701015

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Yetti, M.Pd
NIP. 196512151994032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl Yulius Usman Labuhanraju Kedaton Telp. (0721) 787392. Fax (0721) 787392
Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **"Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran"** Ditulis oleh **Id'ha Ilhami**, Nomor Pokok Mahasiswa 1886131046, telah diujikan dalam Ujian Terbuka Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag

Sekretaris : Dr. Hj. Yetri, M.Pd

Penguji I : Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.A.g

Penguji II : Dr. Oki Darmawan, M.Pd

Penguji III : Andi Thahir, MA., Ed.D

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 196010201988031005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka 30 Desember 2020

ABSTRACT

Pendidikan adalah salah satu segi penopang kehidupan yang penting, dan perhatian terhadap pendidikan sangat diutamakan dalam kehidupan, karena didalam dunia pendidikan meliputi pembiayaan., adapun biaya yang di maksud ialah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk mewujudkan keperluan pendidikan, pendidikan harus memiliki pendapatan pembiayaan yang besar jumlahnya, apalagi pendidikan madrasah swasta yang sumber pembiayaanya hannya mengandalkan dari madrasah itu sendiri, orang tua murid, dan bantuan pemerintah. Dua hal yang timbul perhatian besar pada pembiayaan., Pertama, Pembiayaan termasuk kunci akan penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan, Kedua, lazimnya pembiayaan dalam jumlah besar sulit didapatkan khususnya pada lembaga pendidikan swasta.

Dalam hal tersebut, pendidikan harus memiliki menejemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasa pembiayaan agar tujuan untuk mencapai VISI dan MISI madrasah.

Kemudian berdasarkan hasil survey peneliti, bahwa peneliti memutuskan untuk meneliti Manajemen Pembiayaan Madrasah seperti apa, dan bagaimana pelaksanaannya maka dari itu peneliti fokuskan pada: Perencanaan keuangan (*budgeting*), Pelaksanaan (*accounting*) dan Penilaian (*auditing*), apakah sudah dilakukan dengan baik. Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Perencanaan Pembiayaan di MTs mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran 2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar, Kedondong, Pesawaran 3. Bagaimana Penilaian Pembiayaan MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Madrasah, Bendahara, Waka Kesiswaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Adapun Implementasi Manajemen Pembiayaan melalui fungsi – fungsi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Mathla'ul Anwar dapat meningkatkan Mutu Madrasah dan Prestasi peserta didik secara akademik.

Lalu adapun temuan peneliti pada saat penelitian, bahwa Madrasah Tsanwiyah Mathla'ul Anwar, Memiliki Pendapatan Pembiayaan sepeti :

- Adanya Siswa pindahan dari Madrasah lain.
- Memiliki usaha Foto Copy

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan

RINGKASAN

Manajemen Pembiayaan

Abad sekarang ini adalah abad manajemen, mengkaji manajemen berarti mengkaji tentang sumber daya dan pengelolaan sumber daya dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap komponen system dalam penyelenggaraan lembaga harus berproses, tak terkecuali manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan merupakan pusat inti awal agar dapat terlaksananya suatu lembaga pendidikan. Persoalan biaya ini juga merupakan hal yang sangat vital di suatu sistem lembaga pendidikan yakni, Madrasah, sekolah dll. Dalam tesis ini peneliti coba menghadirkan teori manajemen pembiayaan dengan tiga konsep dasar, Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu: (1). Perencanaan, (2). Pelaksanaan, (3). Penilaian.

Adapun metodologi pada penelitian ini adalah Metode Kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut: 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. 4. Pengecekan keabsahan data. (Triangulasi, Member Check).

Selanjutnya, hasil penelitian pada tesis ini adalah manajemen pembiayaan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran secara umum sudah cukup baik karena perencanaan sudah mengacu pada Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Selanjutnya dalam Pelaksanaan anggaran dan pembukuan pembiayaan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran Tahun Pelajaran 2019/2020 di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan RKAM. yang dibuat, dalam arti anggaran telah dibuat pembukuannya.

Pengawasan pembiayaan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran dilakukan dengan dua system yakni Audit Internal yang dilakukan oleh pihak Madrasah dan audit eksternal yang dilakukan oleh Tim Audit dari dinas kabupaten setempat.

Adapun temuan peneliti bahwa MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran memiliki dana perkembangan diluar dana BOS yang selama ini digunakan, dana tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dana penerimaan siswa pindahan dari madrasah lain sebesar Rp. 8.80.000,- per/ siswa.
2. Usaha madrasah dalam bentuk Foto Copy yang dibentuk pada tahun 2007, pemasukan dana per/ bulan Rp. 70.000.000,-

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MTs MATHLA'UL ANWAR KEDONDONG PESAWARAN, ditulis oleh ID'HA ILHAMI NPM: 1886131046, telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag

Sekretaris : Dr. Yetri, M.Pd

Penguji I : Prof. Dr wan Jamaluddin , M.Ag

Penguji II : Dr. Oki Darmawan, M.Pd

Penguji III : Andi Thahir,M.A.,Ed D



Prof. Dr. H.IdhamKholid, M.Ag

NIP. 196010201988031005

Telah Lulus Ujian Terbuka Tanggal : 30 Desember 2020

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
DIPERSIAPKAN UNTUK UJIAN TERBUKA TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Oki Darmawan, M.Pd
NIP. 197610302005011001

Andi Thahir. M.A.Ed.D
NIP. 197604270200701015

Mengetahui,
Ketua Program Study Manajeme Pendidikan Islam
PPs UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Bandar Lampung, 30 Desember 2020



Dr. Hj. Yetri., MPd
NIP. 196512151994032001

Nama : Id'ha Ilhami

NPM : 1886131046

Tgl. Ujian : 30 Desember 2020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab – Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	d		

B. Mâddah

Mâddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut :

Harokat dan Huruf	Huruf dan Tanda
اَ اِيْ	Â
اِ اِيْ	Î
اُ اُوْ	Û

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi, Arab – Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2003.



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An- Nisa Ayat 58)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggemang langit dan bumi, dengan rahman dan rahimnya yang terhampar melebihi luasnya angkasaraya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kemahabesarannya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner islam, pembangun peradaban manusia, pemimpin yang ditakuti dan disegani, sekaligus teladan umat manusia yang membawa cahaya kebenaran bagi alam semesta yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan mengharap Ridho-mu ya robbi kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kucintai dan yang ku sayangi:

1. Ayah handaku H. Ahmad Azizi Adnan Alm, yang sangat kubanggakan dengan segenap kemampuanku aku persembahkan karyaku ini kepunya, agar setiap ilmu yang ku dapat semga juga menjadi tambahan pahala yang tak pernah putus, hingga yaumul kiyamah. Amin.
2. Ibundaku Hj. Halimatusya'diyah, yang sangat kucintai yang telah mengajarkan banyak hal tentang perjuangannya hidup dan doa dan ridhonya senantiasa mengiringi setiap langkahku dalam meniti kesuksesanku.
3. Kakakku dan abang- abang ku yang selalu memberikan Motivasi dalam hidupku, bahwa hidup adalah suatu proses perjuangan, yang orang lain menjalani dengan jalan yang berbeda beda “ Hidup adalah Perjuangan” dan “Mahasiswa Adalah Makhluq Peneliti”.
4. Untukmu semua teman-teman seperjuanganku, yang sudah diri ini menganggap kalian semua adalah saudaraku yang tak bisa kusebutkan namanya satu bersatu , meskipun pertemuan yang sangat singkat yang kita semua jalani selama kebersamaan saat kita menimba ilmu, terima kasih ku ucapkan kepada allah, karena sudah mengenal kalian.
5. Untukmu Dosen-Dosenku semoga Allah selalu melindungimu dan meninggikan derajatmu di dunia dan akhirat, terima kasih atas bimbingan dan arahnya serta ilmu yang telah diberikan semoga dapat membimbing jalan hidupku di dunia dan akhirat, amin.
6. Dan terima kasih juga Almamater ku UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman sebagai bekal mengabdikan bagi Agama, Bangsa,dan Negara.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Kenikmatan yang tak ternilai ketika akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat terakhir untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti tentang "MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI MADRASAH MATHLA'UL ANWAR KEDONDONG PESAWARAN". Dalam pembahasannya peneliti membagi dalam lima bab. Pada bab pertama tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta kerangka pikir penelitian. Untuk lebih memahami tentang masalah penelitian sajikan dalam tinjauan pustaka pada bab kedua. Lalu

pada Bab ketiga menguraikan tentang metode penelitian antara lain dikemukakan tentang jenis tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, sampai kepada analisis data. Hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian disajikan pada bab keempat. Dan pada bab kelima merupakan bab kesimpulan yang merupakan hasil temuan dari kegiatan penelitian dan berdasarkan hasil temuan tersebut diajukan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait.

Dalam penulisan Tesis ini, peneliti tidak akan dapat berhasil tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Jamal Fakhri, M.Ag selaku Wakil Direktur Manajemen Pendidikan Islam
3. Ibu Dr. Yetri., M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam
4. Bapak Dr. Oki Darmawan M.Pd sebagai Pembimbing I dan Bapak

Andi Thahir. M.A., Ed.D sebagai Pembimbing II dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan dan semoga tulisan ini bermanfaat Amin.

Bandar Lampung, 30 Desember 2020
Penulis,

Id'ha Ilhami



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
RINGKASAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Masalah	10
C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus	12
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	68
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	74
B. Latar Penelitian.....	74
C. Metode Prosedur Penelitian.....	79
D. Data Dan Sumber Data	80
E. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data.....	82
F. Prosedur Analisa Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Gambaran Umum tentang lokus Penelitian	94
B. Temuan Penelitian	103
C. Pembahasan Temuan Penelitian	114
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Rekomendasi	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	134
Lampiran 1. Lampiran Pedoman Wawancara	135
1.1 Kisi- Kisi instrumen Wawancara	136

1.2 Daftar Pernyataan Wawancara Peneiti.....	137
1.3 Daftar Hasil Wawancara Dengan Kepala Madrasah.....	138
1.4 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Waka Kesiswaan.....	141
1.5 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Bendahara	143
Lampiran 2. Lampiran Observasi dan Hasil Observasi	146
2.1 Kisi- Kisi Instrumen Observasi	147
2.2 Lampiran Hasil Observasi	148
Lampiran 3. Lampiran Dokumentasi	151
3.1 Lampiran Pembiayaan Siswa.....	152
3.2 Lampiran Rapat RKAM	153
3.3 Lampiran Monitoring Kemenag Jakarta.....	154
3.4 Lampiran Monitoring BOS Kemenag Kabupaten	155
3.5 Lampiran Jumlah Siswa MTs Mahla'ul AnwaR	156
3.6 Lampiran RKAM Mts Mathla'ul Anwar.....	157
3.7 Lampiran Pengeluaran Belanja Madrasah.....	158
3.8 Lampiran Lembar RKAM	159
3.9 Lampiran Buku Kas Umum.....	160
3.10 Lampiran Buku Rekening MTs Mathlaul Anwar.....	161
3.11 Lampiran Surat Balasan Penelitian.....	162



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Ssiklus Akuntansi.....	42
2. Contoh Anggaran Rutin	63
3. Contoh Buku Kas Umum	64
4. Contoh Buku Kas Pembantu	64
5. Tanah Kepemilikan Yayasan	98
6. Sarana Prasarana Yang di Fasilitasi Yayasan	98
7. Dafar Nama- Nama Guru dan Karyawan 2019/ 2020.....	99
8. Keadaan Siswa Mts Mathla'ul Anwar 2019/ 2020	101
9. Rincian Pengeluaran Madrasah.....	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Menejemen Pembiayaan	74
2. Denah Lokasi Madrasah	94
3. Struktur Organisasi Mts Mathla'ul Anwar 2019/2020	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu segi penopang kehidupan yang penting, dan perhatian terhadap pendidikan sangat diutamakan dalam kehidupan, karena menurut Nanang Fatah didalam dunia pendidikan meliputi pembiayaan adapun biaya yang dimaksud ialah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya – biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat – alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar¹. Maka dari pada itu bukanlah hal yang mudah seperti membolak balikan telapak tangan bagi seseorang atau lembaga untuk melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan tempat yang penuh akan lika-liku permasalahan, Akan tetapi yang paling inti di dalamnya adalah manajemennya. Mengapa demikian, karena keberhasilan manajemen akan menjadi barometer keberhasilan pendidikan itu sendiri. Adapun secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam contohnya di Indonesia sangatlah terkait erat dengan kegiatan dakwah Islamiyah.

Pendidikan Islam juga berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan pengalaman masyarakat terhadap ajaran Islam amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan islam yang diterimanya.

¹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002), h. 23.

Pendidikan islam tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tingkat seperti sekarang ini.

Dalam ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur. Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam At-Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya : “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang di antara kamu sekalian yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqon (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. At-Thabrani).

Pendidikan dalam Islam sudah semestinya dikelola dengan sebaik-baiknya. Manajemen pendidikan Islam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat dari keterbelakangan, baik secara moral, materi, dan spiritual. Dalam Islam, manajemen adalah hal yang sangat penting. Hal ini tampak dalam ungkapan bijak yakni dari perkataan sahabat Rasulullah Ali ra :

أَلْبَا طُلٌ بِنِظَامٍ يَغْلِبُ الْحَقَّ بِلَا نِظَامٍ

Artinya : “Perkara yang batil (keburukan) yang tertata dengan rapi bias mengalahkan kebenaran (perkara) yang tidak tertata dengan baik”

Maksud perkataan sahabat Ali Bin Abi Thalib RA adalah manajemen yang baik adalah manajemen yang mempunyai konsep dan sesuai dengan objek serta tempat organisasinya. Adapun proses manajemen merupakan aktivitas yang melingkar, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai dengan pengawasan.

Manajemen secara umum diartikan sebagai pengelolaan, penataan atau pengaturan. Manajemen menurut R.W. Griffin dalam Nur Komariyah adalah serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya

organisasi (tenaga kerja, keuangan, fisik dan informasi) yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.²

Manajemen juga sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick dalam Nanang Fatah karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet dalam Nanang Fatah karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.³

Pembiayaan pendidikan, sudah kita ketahui bahwa biaya akan pendidikan pasti kaitannya dengan uang karena pendidikan memerlukan biaya (*cost*). Adapun pembiayaan pendidikan itu sendiri ialah suatu proses pengalokasian sumber dana terbatas untuk melaksanakan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah jumlah yang dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan.⁴

Jadi manajemen pembiayaan pendidikan suatu cara perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai dengan pengawasan keuangan pendidikan, tujuannya ialah tercapainya sesuai dengan visi dan misi madrasah tersebut.

Dikarenakan selama ini ada kesan bahwa pembiayaan atau keuangan adalah segalanya dalam kemajuan lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manager lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Sebab mereka berfikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Upaya memajukan komponen-

²Nur Komariah, Implementasi Fungsi Manajemen Pendidikan Di SDI Wirausaha Indonesia, *Ejournal*, Volume XVI, Nomor 1, 2018, h.108.

³Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Ed.7, h.1.

⁴Ramayulis dan Mulyadi, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), h.306-307.

komponen pendidikan tanpa disertai dukungan uang seakan pasti berhenti ditengah jalan.

Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada pembiayaan atau keuangan, yaitu: *pertama*, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. *Kedua*, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya pada lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.⁵

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat.”⁶ Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan.

Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu: 1. Bantuan masyarakat, 2. Bantuan murid/ siswa atau orang tua dan 3. Bantuan pemerintah, sedangkan dana untuk pengelolaan madrasah swasta berasal dari sumber swasta itu sendiri, orang tua murid/ siswa dan bantuan pemerintah⁷.

Komponen keuangan madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen yang lain.

Diantaranya komponen- komponen tersebut penyelenggaraan pendidikan yang perlu dialokasikan dana khusus yang antara lain : 1). Kegiatan identifikasi input siswa. 2). Modifikasi kurikulum, 3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, 4).

⁵Muzammil Komar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2007), h. 163

⁶*Ibid*, h. 165.

⁷ Ramayulis dan Mulyadi, *Op Cit.* h. 110-111.

Pengadaan sarana dan prasarana, 5) Pemberdayaan peran serta masyarakat, 6) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.⁸

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa biaya pendidikan memiliki alokasi-alokasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Dan adapun tata cara pembagian keuangan tertulis dalam administrasi madrasah.

Mulyono mengatakan secara lebih luas di dalam Fauzan bahwa administrasi keuangan madrasah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara *continue* terhadap biaya oprasional madrasah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.⁹

Jadi, Administrasi keuangan madrasah adalah sebuah analisis pengelolaan terhadap sumber dana yang diperoleh oleh madrasah yang bersangkutan, perencanaan keuangan, pengelokasian keuangan dan pengawasan keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yang lebih khususnya adalah tujuan madrasah secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas yang menggunakan prinsip manajemen yang meliputi prencanaan keuangan/sumber dan penggunaan dana menganalisis penggunaan uang dan mengendalikan penggunaan uang lembaga atau organisasi sebagai bentuk pelaksanaan keuangan untuk mengambil keputusan.

Jika dilihat dari antusias masyarakat tentang madrasah, khususnya di MTs Mathla'ul Anwar (Mts MA) ini, keinginan masyarakat sekitar atau orang tua sangat cukup antusias untuk memasukkan putra dan putrinya untuk dapat mengemban pendidikan dimadrasah tersebut, mengapa demikian karena di MTs Mathla'ul Anwar ini selain mempelajari pelajaran umum juga mempelajari ilmu-ilmu keislaman,

⁸Nuraiedi, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2015), h. 152

⁹Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 85.

misalnya anak- anak diwajibkan menghafal ayat- ayat alqur'an dan doa - doa, sebelum mereka melaksanakan kegiatan semesteran, baik itu semester 1 dan 2 hal ini memang sudah menjadi kewajiban atau kegiatan peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan di MTs Mathlau'ul Anwar kedondong ini,. Adapun di MTs Mathla'ul Anwar memiliki 9 ruang kelas, kelas VII memiliki 3 ruang kelas, kelas VIII memiliki 3 ruang kelas, kelas IX memiliki 3 ruang kelas, di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran ini memiliki ciri khas dari madrasah- madrasah lainnya, adapun ciri khasnya yaitu bagi anak yang hafal Alqur'an bisa gratis uang daftar ulang, inilah yang merupakan nilai lebih atau nilai jual di Madrasah Tsanawiyah Matla'ul Anwar Kedondong Pesawaran. Pada zaman sekarang ini sangat banyak bermunculan madrasah- madrasah menengah pertama/ yang sangat menonjolkan keislamiyahan berbasis Madrasah contohnya MTsN 1 Kedondong Pesawaran, walaupun madrasah ini menjadi acuan MTs Mathlaul Anwar tetap merupakan daya saing yang kuat terhadap madrasah- madrasah swasta.

Adapun keunggulan MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran tersebut ialah :

1. Gratis Daftar Ulang apabila calon siswa/i memiliki hafalan Al-qur'an Baik itu 1 Juz, 2 Juz dan 3 Juz dst, dan ini juga berlaku bagi siswa/i yang sudah terdaftar di MTs Matlau'ul Anwar Kedondong, Pesawara.
2. Terakreditasi B
3. Lokasi strategis dan mudah dijangkau
4. Lingkungan cukup bersih, Aman dan Nyaman
5. Memberikan santunan untuk anak yatim Khususnya yang menuntut ilmu di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar
6. KSM (Kompetisi Sain Madrasah) di tingkat Kab. (Juara Umum)
7. Berprestasi di tingkat Nasional dalam Bidang Pramuka¹⁰

¹⁰Wawancara, Kepala Madrasah Hafid Maulana Tanggal. 14 Desember 2019

Bersamaan dengan perkembangannya MTs Mathla'ul Anwar selain dari pelajaran-pelajaran di kelas, siswa juga diberi bekal pelajaran-pelajaran Non Akademik atau Ektrakurikuler di luar kelas untuk mengasah keterampilan - keterampilan siswa seperti:

1. OSIS
2. Pramuka.
3. Dram Band
4. Tari Tradisional
5. Sholawat Hadroh.
6. PMR
7. KSM (Kompetensi Sain Madrasah)

Adapun bidang usaha di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran ialah berbentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk UKM tersebut ialah Foto Copy dan ini merupakan salah satu pendapatan untuk penunjang dana selain dari dana BOS terhadap kemajuan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar. Selain dari semua itu faktor penunjang pendidikan yang sangat penting adalah didukung oleh lingkungan yang strategis, sarana dan prasarana yang cukup memadai, agar terciptanya kondisi KBM yang nyaman dan kondusif dan menyenangkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah. perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah/sekolah tersebut, dan mengapa prosedur tersebut dilakukan, maka perlu adanya pengkajian khusus.

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup lima kegiatan pokok, yaitu: (1). Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan), (2). Dana Penunjang Pendidikan,

(3). Bantuan / sumbangan dari BP3 (4). Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada) (5). Bantuan lain lain. madrasah swasta tidak terikat oleh dana pemerintahan terlalu banyak, akan tetapi mereka lebih leluasa menyusun RKAM melalui prosedur tertentu, yang besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun dan perkiraan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun lalu.¹¹

Perencanaan pembiayaan di madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RKAM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.¹²

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi diatas peneliti memiliki keinginan meneliti manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran, dan memfokus pada penelitian ini pada manajemen pendidikan madrasah. Sedangkan Sub Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Budgeting*)
2. Pelaksanaan (*Accounting*)
3. Penilaian (*Auditing*)

C. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini tidak melebar peneliti putuskan untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran, meliputi :

¹¹Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), h.

¹²Sunedi dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, and Zulfa Jamalie, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat : Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya" Volume 9, No. 1, 2017h. 40.

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran?
3. Bagaimana penilaian pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan Penelitian

Karena adanya keinginan tauan peneliti khususnya, maka peneliti memiliki Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui manajemen pembiayaan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran.

Dengan tujuan : 1). Peneliti ingin mengetahui perencanaan pembiayaan yang dilakukan di MTs Matla'ul Anwar. 2). Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pembiayaan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran. 3). Peneliti ingin mengetahui penilaian pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran.

E. Manfaat Penelitian Kegunaan Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan memberi manfaat baik-bagi objek atau peneliti khususnya dan juga bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Dengan dilakukan penelitian mengenai “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran”. Diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Dari Aspek Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pembiayaan pendidikan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Dari aspek Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan optimalisasi penggunaan pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus

a. Pengertian Manajemen Pembiayaan

Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, biaya itu sendiri umumnya adalah berbentuk uang yang dikeluarkan untuk melakukan belanja atau pengeluaran.¹³

Pembiayaan pendidikan merupakan salah sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar.¹⁴

Salah satu ahli manajemen pembiayaan yaitu R. Agus Sartono, mengatakan bahwa manajemen pembiayaan bisa disimpulkan sebagai manajemen dana, karena memiliki keterkaitan dengan pengalokasian dalam bentuk dana investasi secara efektif dan efisien baik terbilang untuk usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau bisa juga pembelajaran secara efisien¹⁵.

a. Keputusan Depdiknas menyatakan bahwa manajemen pembiayaan bisa juga dikatakan gerakan yang mengurus bidang ketatausahaan keuangan yang mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan¹⁶.

b. Menurut Suad Hasan dan Enny Pudjiastuti bahwa manajemen pembiayaan

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 129

¹⁴ Masditau, *MANAJEMEN PENDIDIKAN MANUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU*, Medan : POLTEKPAR jurnal ANSIRU PAI, Vol. 1 No. 2 : 2017 h.119
DOI:<https://www.google.com/search?q=JURNALMANAJEMEN+PEMBIAYAN+PENDIDIKAN+MENUJU+PENDIDIKAN+YANG+BERMUTU>

¹⁵ R. Agus Santono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: FE UGM, 2001), h. 6

¹⁶ Depdiknas, *Undang Undang Tentang Sistem Nasional*, (Jakarta: Tamita Utama, 2003), h. 57

ialah kegiatan yang didalamnya memiliki perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan¹⁷

- c. Dalam pengertian Manajemen keuangan, bahwa manajemen keuangan memiliki fungsi - fungsi, Adapun fungsi keuangan memiliki kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dapat bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Seperti menggunakan dana dan mendapatkan dana¹⁸. Dan konsep manajemen dapat dijabarkan dalam kalimat seperti: a. membuat keputusan, b. memberi perintah, c. menetapkan kebijakan, dan d. menyediakan pekerjaan dan sistem imbalan dan mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan kebijakan. Di dalam manajemen juga dapat memutuskan tujuan yang akan dicapai dengan mengintegrasikan pengetahuan dan keahlian dengan pandai bercakap dan pengalaman personil. Agar berhasil, manajemen wajib melakukan secara efektif fungsi - fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun Fungsi utama manajemen eksekutif yaitu Perencanaan dan pengorganisasian, Dan fungsi manajemen operasional (lower management) ialah memiliki andil dalam bidang pengawasan. melihat dari ke 3 fungsi manajemen tersebut agar dapat terealisasi dengan baik harus memiliki kerjasama saling memiliki keterkaitan dan keterlibatan dari setiap tingkatan manajemen.¹⁹

Adapun unsur manajemen pembiayaan meliputi pembiayaan dimadrasah antara lain :

1. Upah guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.
2. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
3. Biaya pengembangan pendidikan.

¹⁷ Suad Hasan dan Erni Pudji astuti, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1998),h. 4

¹⁸ Abu Bakar Taufani C. Kurniatun, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 256

¹⁹ *Ibidh.* 256

4. Biaya kebutuhan dan pengembangan²⁰

Dengan demikian konsep manajemen dapat digambarkan dalam kalimat seperti membuat keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, menyediakan pekerjaan dan system reward (imbalan) dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dengan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan kecakapan dan pengalaman personil. Supaya berhasil, manajemen harus melaksanakan secara efektif fungsi – fungsi perencanaan, pelaksanaan ,pengawasan.

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan/keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip prinsip agar dalam pelaksanaannya penegelolaan itu dapat berlangsung efektif dan efisien. Prinsip pengelolaan keuangan madrasah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada Prinsip keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik.

1. Transparan

Transparan bisa dikatakan sebagai keterbukaan sumber dana dan jumlah secara terinci dalam penggunaan dana, dan memiliki pertanggung jawaban yang jelas, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas agar mencapai suatu tujuan yang akan menjadi tanggungjawabnya.dalam hal contoh

²⁰ Husen Umar, *Riset Sumberdaya Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 40

menggunakan dana pendidikan harus dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan.

3. Efektifitas

Efektifitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Adapun pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas jikalau kegiatan tersebut dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktifitas dalam suatu pencapaian tujuan pendidikan.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan penekanan pada suatu hasil kegiatan. Dan juga Efisiensi secara definisinya yaitu perbandingan yang terbaik dalam bentuk pemasukan (input) dan pengeluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud ialah tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.²¹

Sementara di dalam islam terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut :

1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf sebagaimana tersebt di atas.
2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan

²¹ Masditau, *Op Cit* h. 127-129

untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.

5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
7. Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya.²²

Menurut Dr. Wayan Sidarta dalam Amirudin bahwa pekerjaan yang efektif ialah “Pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana” .Kedua kata “efektif” dan “efisien” selalu dipakai bergandengan dalam manajemen karena manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan²³.

²² Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, kalam mulia, 2016 h.229-230

²³ Amirudin. *Manajemen Pendidikan Islam Persepektif Filsafat ilmu dan Al-qur'an*. Ijtimayya, Vol.6, No.2.2017 h. 34 DOI : <https://jurnal.neliti.com>

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan kedua hal tersebut adalah terdapat dalam al-Qur'ann surah al-Kahfi ayat 103-104 yaitu:²⁴

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ١٠٤

Artinya : Katakanlah "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?"Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.(Q.S. Al-Kahfi: 103, 104)

ayat diatas bahwa apabila kita melakukan segala sesuatu harus memikirkan seberapa baiknya yang kita akan lakukan harus terencana dengan baik sehingga keefektifan kinerja dapat di sesuaikan dengan pengeluaran.

Adapun ayat lain yang mengisyaratkan pekerjaan efektif dan efisien terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 26-27 yang mengemukakan bahwa

.²⁵

وَأَتِ دَا الْفَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ ٢٦
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ٢٧

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(Qs. As-Isra': 26-27)

ayat diatas menunjukan bahwa kaitannya Dalam pengelolaannya Manajemen Penbiayaan adanya keterbukaan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut.Yang dimaksud dengan terbuka di sini bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar tetapi juga mau memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain, terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staf untuk mengembangkan diri

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Translit & Trejemah*, (Ciputat: Cipta Bagus Segara,2011).h.304

²⁵ *Ibid.*,h.289

sesuai dengan kemampuannya baik dalam jabatan maupun bidang lainnya. Al-Qur'an telah memberikan landasan kepada kaum muslim untuk berlaku jujur dan adil. Hal ini merupakan kunci keterbukaan, karena tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua unsur tersebut tidak terpadu.

Adapun ayat al-Qur'an yang menyuruh umat manusia untuk berlaku jujur dan adil yang keduanya merupakan kunci keterbukaan antara lain terdapat dalam surah an-Nisa ayat 58 yang mengungkapkan bahwa.²⁶

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Maksud ayat diatas berlaku adil adalah dalam menegakkan aturan atau menerapkan aturan, dan sampaikanlah/ berikan hak orang lain dengan sangat adil.

c. Sumber-Sumber Dana Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yaitu tentang pendanaan pendidikan diatur berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

1. Prinsip keadilan
Berarti bahwa besarnya dana pendidikan yang di dapatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Prinsip kecukupan
Berarti bahwa pengalokasian dana pendidikan cukup terbiang untuk bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Prinsip keberkelanjutan
Berarti bahwa dana pendidikan bisa digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan pendidikan ynag memenuhi NSP. ²⁷

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan pasal 52 pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau Walinya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

²⁶ Ibid.,h.87

²⁷ Masditau, *Op.Cit.*,h.353

1. Didasarkan pada perencanaan dana investasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta penganggaran tahunan yang mengacu pada NSP.
2. Perencanaan Investasi dan operasional sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 diberitahukan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
3. Dana yang didapat disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.
4. Dana yang didapat dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan.
5. Tidak menerima imbalan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi.
6. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
7. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada poin satu.
8. Tidak mengkaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
9. Sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
10. Tidak dialokasikan secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
11. Pemungutan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik, dan dilaporkan kepada menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah yang sudah ditentukan dan diterapkan oleh menteri.
12. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.²⁸

Sumber-sumber pendapatan madrasah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri madrasah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Keputusan mendiknas Nomor 056/U/2001 tentang pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah pasal 6 ayat 2 menyebutkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dilakukan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat dan orang tua, penggunaannya untuk pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Sumber

²⁸ *Ibid*, h.354

dana madrasah mencakup: 1. Pemerintah, 2. orang tua peserta didik, 3.

Kelompok masyarakat, 4. Dana minor. Sebagai berikut:²⁹

1. Pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Daerah
Pada saat ini Sumber dana pendidikan untuk SD, SMP, SMA, bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Disamping itu, terdapat dana khusus melalui pemerintah daerah provinsi dan dana dari kabupaten yang disebut dana khusus APBD I dan APBD II. Dana BOS ini merupakan dana operasional Non Personalia, sedangkan untuk upah pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin melalui APBN dan APBD.
2. Orang tua siswa
Sumber keuangan madrasah yang berasal dari orang tua yang dapat berbentuk sumbangan penyelenggaraan pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Pembangunan Pendidikan (DPP), iuran pendidikan, dan Lainnya.
3. Masyarakat
Sumber keuangan madrasah yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu madrasah. Sumbangan ini dapat berasal sumbangan perorangan, organisasi, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, dan lainnya³⁰
4. Sumber Dana Minor
Dana minor madrasah mencakup pembiayaan yang berasal dari hasil lelang dan laba Unit usaha. Adapun hasil dana yang didapat dari lelang merupakan sumber pemasukan dana madrasah. Dapat dikatakan madrasah dapat melelang sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan kepada masyarakat.

Sementara sumber-sumber pembiayaan pendidikan dalam islam dapat diperoleh melalui:

a. Sumber Dana Halal yang mengikat

1. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit,

²⁹ *Ibid*,h.356

³⁰ Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 86

menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

2. Zakat

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan islam

3. Shodaqoh

Shodaqoh atau disebut juga *shodaqoh sunnah*, merupakan anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan di atas maka sedekah pula dapat dijadikan sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan islam

4. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan dan ilmiah. Melihat pengertian hibbah, jelas bahwa hibbah ini termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan³¹

b. Sumber Dana Lainnya yang Halal dan Tidak Mengikat

Bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pesantren dan madrasah selain sumber diatas bisa pula memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya baik sumber intern maupun sumber ekstern.

³¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 293-298

1. Sumber Dana Intern

Sumber dana lembaga pendidikan Islam dapat diperoleh dari :

a. Membentuk Badan Usaha atau Koperasi

Upaya lain yang dapat menjadi sumber dana bagi lembaga pendidikan Islam ialah adanya Badan Usaha dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Koperasi dan BMT (Baitulmal Watamwil). Badan Usaha tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dimana lembaga Pendidikan itu berada.

b. Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.

c. Membentuk Badan Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Islam/Yayasan dengan Orangtua Murid.

2. Sumber Dana Ekstern

Sumber Dana Ekstern dapat diusahakan dengan cara :

a. Membentuk donatur tetap

b. Mengupayakan bantuan Pemerintah

c. Bantuan luar negeri³²

d. Tujuan Manajemen Pembiayaan

Melalui manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan madrasah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program madrasah secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen keuangan adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran madrasah.

³²*Ibid.*, h. 300

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diharapkan kreativitas kepala madrasah dan pengelola keuangannya dalam menggali sumber– sumber dana, dan menempatkan bendaharawan dan petugas lainnya yang menguasai ilmu ekonomi akuntansi, sehingga dalam pembukuan dan membuat pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

e. Fungsi Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan catatan Depdiknas, pengelolaan keuangan adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, menggunakan, mengevaluasidan mempertanggungjawabkan keuangan madrasah kepada pihak– pihak yang berkepentingan³³. Sedangkan Suad Husnan mengemukakan bahwa fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana³⁴

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai dengan efektif dan efisien maka perlu memfungsikan manajemen itu sendiri dengan baik.

Manajemen memiliki tiga tahapan penting antara lain:

1. Perencanaan(*Budgeting*)
2. Pelaksanaan(*Accounting*)
3. Penilaian(*Evaluasi*)

Ketiga tahapan manajemen diatas apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah:

1. Perencanaan keuangan (*Budgeting*).
2. Pelaksanaan (*Accounting*).

³³Depdiknas Dinasmen TK dan SD, *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), h. 26

³⁴Abubakar,Taufani C. Kurniatun,*Op Cit*, h. 256

1. Perencanaan Keuangan (*Budgeting*)

Perencanaan yaitu tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka ruang dan waktu tertentu³⁶ Dengan demikian, perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Suatu perencanaan yang baik dan diharapkan mencapai hasil harus berisi berbagai kegiatan mulai dari *forescasting, objectives, policies, programes, schedules, procedures* dan *budget*.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya melakukan perencanaan sebelum melakukan suatu pekerjaan agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr: 18)³⁷

Ayat ini memberi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis ini disebut dengan perencanaan (*planning*)³⁸ dan Perencanaan keuangan (*budgeting*) dalam manajemen keuangan. Dalam manajemen, perencanaan sangat penting

³⁵Ramayulis dan Mulyadi. *Op Cit.* h.109

³⁶Ek. Muchtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Karya Aksara, 1986), h. 9-10

³⁷Departemen Agama R.I, *Al Hidayah Alqur'an Tafsir per Kata*, (Cempaka Putih: Kalim, 2010), h. 549

³⁸Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 30

karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan sehingga apa pun kegiatan yang dilakukan berjalan dengan tertib.

Penganggaran merupakan suatu proses kegiatan atau proses sesuatu penyusunan anggaran (*budget*). Budget yang merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan anggaran dapat dikatakan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Penganggaran sektor publik berbeda dengan perusahaan swasta, karena penganggaran sektor publik lebih banyak muatan politis sedangkan perusahaan swasta relatif sedikit muatan politisnya selain itu bagi sektor publik anggaran tidak hanya sebagai sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

a. Karakteristik Anggaran

Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber- sumber lainnya, sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Istilah–istilah yang lazim untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangunan.

b. Fungsi Anggaran

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah.

Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan.

Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian.

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan.

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah dan kebijakan tertentu.

4. Anggaran sebagai alat politik.

5. Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang akan dijanjikan.

6. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.

Dengan dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya.

7. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhi efisiensi biaya.

8. Anggaran sebagai alat motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai- nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin di capai. Atau kata lain anggaran jangan

terlalu tinggi sehingga tidak dapat terpenuhi dan jangan terlalu rendah sehingga mudah di capai.

c. Prinsip- Prinsip Anggaran dan Prosedur Anggaran

Prinsip-prinsip penyusunan anggaran, apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian antara lain:

1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi.
2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
4. Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah.

Sedangkan apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Otorisasi/pendelegasian oleh legislatif.
2. Komprehensif/menyeluruh.
3. Ketuhanan artinya semua penerimaan dan pengeluaran tersebut tercakup dalam satu dana umum.
4. Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang di setujui legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis.
5. Periodik.
6. Akurat.
7. Jelas.
8. Transparansi³⁹

d. Prosedur Penyusunan Anggaran

Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan di laksanakan selama periode penganggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dapat diaplikasikan dalam bentuk uang, jasa dan barang.
3. Semua sumber dapat dinyatakan dalam bentuk pembiayaan sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
4. Memformulasikan anggaran dalam format bentuk yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.

³⁹Abubakar,Taufani C. Kurniatun, *Op. Cit* , h. 260

5. Menyusun apa yang sudah di usulkan dalam bentuk anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
6. Melakukan revisi usulan anggaran.
7. Persetujuan revisi usulan anggaran.
8. Pengesahan anggaran⁴⁰

e. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran yaitu:

1. Menginventarisasikan rencana yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun rencana berdasar skala prioritas untuk pelaksanaan anggaran..
3. Menentukan program kerja anggaran dan rincian program anggaran.
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan dan membuat rincian- rincian program.
5. Menghitung pembiayaan yang akan dibutuhkan.
6. Menentukan sumber pembiayaan untuk membiayai rencana agar terlaksana⁴¹.

Dalam setiap kegiatan manajemen keuangan, pengelolaan keuangan memerlukan perencanaan. Merencanakan itu sendiri pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan dimasa yang akan datang (masa depan). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber-sumber keuangan agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin.

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 (tiga) kegiatan yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan :

1. Perumusan tujuan yang ingin dicapai
2. Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
3. Identifikasi dan pengarahan sumber-sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

⁴⁰Ibid h. 260

⁴¹ Bambang ismanto. *Pengembangan model pengelolaan anggaran sekolah berbasis partisipasi*. Jurnal widiyasari : model anggaran sekolah parstisipasi. h. 2 2017 DOI : <https://www.google.com/search?q=JURNAL+WIDYA+SARI+PENGEMBANGAN+MODEL+PENGELOLAAN+ANGGARAN+SEKOLAH+BERBASIS+PARTISIPASI>

Oleh karena itu perencanaan merupakan tindakan yang menetapkan lebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana untuk mengerjakannya, apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana cara pengerjaannya⁴².

Pada dasarnya tujuan perencanaan sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan.. Perencanaan merupakan siklus tertentu dan melalui siklus tersebutlah suatu perencanaan bisa untuk dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan⁴³

Secara umum ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan yang baik yaitu sbb:

1. Perencanaan yang efektif diawali dengan tujuan secara lengkap dan jelas. Tujuan merupakan keharusan perencanaan, apabila tujuan itu banyak, maka harus memilih tujuan yang memudahkan dalam pencapaiannya. Skala prioritas perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan.
2. Setelah tujuan ditetapkan langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan.
3. Menganalisis dan menetapkan cara agar sarana agar mencapai tujuan dalam rangka mengambil kebijakan yang telah dirumuskan.
4. Memilih orang-orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk orang yang akan melakukan pengawasan.
5. Menentukan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan perbandingan apa yang harus dicapai, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.⁴⁴

Dalam perencanaan keuangan ada beberapa model yang ditawarkan, sebagaimana dikatakan :

Dalam pendidikan model perencanaan patut diperhatikan antara lain: model perencanaan komprehensif, model target setting, model costing (pembiayaan) dan efektifitas biaya, dan model PPSB.⁴⁵

Pada dasarnya perencanaan anggaran adalah sinonim dengan perencanaan pengajaran, aktivitas yang mesti dilakukan adalah proses penyusunan belanja yang mencakup :

1. Menilai masyarakat madrasah dan kebutuhan peserta didik, permasalahan dan isu-isu

⁴²Nanang Fatah, *Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, (Bandung: PT. Kemaja Rosda Karya, 1998),h. 49

⁴³Soebagia, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, (Mendidik Anak Sukses Masa Depan, Pandai Dan Bermanfaat)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003),h. 79

⁴⁴*Ibidh.* 80

⁴⁵Nanang Fatah, *Op. Cit.* h. 51

2. Mengadakan identifikasi dan meninjau kembali tujuan dan prioritas.
3. Menjabarkan tujuan yang bersifat umum kedalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang dapat diukur.
4. Mengembangkan struktur dan format program demi tercapai sasaran⁴⁶

Pembiayaan dimadrasah itu sendiri meliputi :

1. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi
2. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Penyelenggaraan pendidikan.
4. Biaya keperluan dan pengembangan⁴⁷

Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang dimaksud disini tidak terlepas dari upaya pengelolaan dana itu sendiri, dari mana sumber–sumber dana itu dapat (pemerintah, masyarakat, orang tua murid) pengalokasian sumber dana, implementasi/ pelaksanaan di lapangan, monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Sumber dana pendidikan adalah lembaga atau pihak– pihak yang memberikan dana, baik berupa natura atau uang kepada madrasah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, UU No. 20 Tahun 2003 PP. 30,29,28 dan 27 menyebutkan bahwa sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa.

MC. Mahon dan Suwaryani menyebutkan bahwa sumber pendapatan madrasah dapat diklasifikasikan kedalam tiga sumber utama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua⁴⁸

Sumber dana dari pemerintah terdiri dari: pemerintah pusat (departemen yang berkaitan dengan pendidikan), pemerintah provinsi yang berkaitan dengan

⁴⁶Wahyu Sumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h.323

⁴⁷*Ibid*, h. 205.

⁴⁸M.C Mahon WW, *Improving Education Finance in Indonesia*, (Jakarta: policy Research center, intitut For Research and Develoment, 2001),h.60

pendidikan, pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pendidikan dan bantuan asing⁴⁹

Kalau di Kementerian Agama bantuan untuk biaya pendidikan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan- tujuan pendidikan.

Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk madrasah dasar negeri umumnya memiliki sumber–sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tidak diperkenankan memungut dari orang tua murid.

Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di madrasah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen– komponen yang jumlah dan porsinya bervariasi di antara madrasah yang satu dan yang lainnya.

Adapun gambaran Pembiayaannya meliputi :

- a. Biaya pembangunan (*capital costs*).
- b. Biaya rutin (*current costs*) seperti gaji guru, kapur tulis dll
- c. Biaya tak langsung (*indirect cost atau income for gone*)⁵⁰

Biaya pembangunan di lingkungan madrasah ini sering di sebut dengan lingkungan proyek. Sumber dana ini biasanya dalam proses pengajuannya dimulai dari bawah yaitu dari tingkat madrasah itu sendiri meminta untuk mendirikan gedung atau meminta tambahan gedung, baik gedung ruang kelas

⁴⁹ J. (terj. Harso) Hallak, *Analisis Biaya & Pengeluaran Untuk Pendidikan*, (paris: Bharata Karya Asara, 1985),h. 23

⁵⁰ Djum Beransyahindar, *Perencanaan Pendidikan Strategi Dan Implementasinya*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 95

maupun ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang guru dan ruang kepala madrasah ke pusat (Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia), bagi madrasah- madrasah swasta uang pembangunan itu biasanya dipintakan kepada peserta didik baru pada saat pendaftaran sebagai syarat membayar uang bangunan, kumpulan dari sumbangan pembangunan ini dihimpun lalu digunakan untuk pembangunan di madrasah.

Sedangkan biaya rutin adalah biaya yang diperoleh dari pemerintah yang alokasinya biasanya sudah ditentukan, didalamnya termasuk gaji pegawai negeri, tunjangan fungsional, tunjangan istri, tunjangan anak juga sebagian digunakan untuk pendidikan dan pengajaran.

Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses belajar mengajar. Contohnya biaya, gaji, tata usaha madrasah.

Penganggaran (*budgeting*) merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu priode tertentu, selanjutnya Koots membatasi bahwa *budgeting* adalah formasi perencanaan untuk priode tertentu dibutuhkan sejumlah dana⁵¹

Dalam penganggaran diperlukan secara rinci sumber-sumber dana dari mana saja yang akan diprediksi menjadi masukan dan memperkirakan pengeluaran yang bakal terjadi.

Penganggaran memerlukan poses secara bertahap yaitu:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam priode

⁵¹ Nanang Fatah, *Op. Cit.* 68

- anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, mesin dan material.
 3. Sumber-sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya pernyataan finansial.
 4. Memformulasikan anggaran menurut format yang telah disepakati.
 5. Usaha memperoleh persetujuan dari yang berwenang (pengambilan keputusan) dalam tahap ini dilakukan kompromi melalui rapat-rapat untuk mempertimbangan secara objektif dan subjektif.⁵²

Dalam penyusunan anggaran ada 4 fase kegiatan pokok antara lain:

1. Perencanaan anggaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan menentukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam penampilan oprasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa, membuat rekomendasi alternatif. Pendekatan untuk mencapai sasaran.
2. Mempersiapkan anggaran: yaitu penyesuaian kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku bentuknya distribusi dan sasaran program pengejaran perlu dirumuskan yang jelas. Melakukan inventarisasi perlengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang tersedia.
3. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Menilai pelaksanaan anggaran, antara lain menilai proses belajar mengajar menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaaran yang akan datang⁵³

Berdasarkan dari pernyataan di atas menunjukan perlunya mengidentifikasi dan menentukan perencanaan kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan baik untuk gaji guru, pengadaan alat-alat pelajaran, buku pelajaran, alat-alat kantor dan sebagainya. Suryosubroto dalam buku Manajemen Pendidikan Madrasah mengatakan biaya penyelengaran sekolah itu meliputi:

1. Pengadaan alat atau bahan manajemen.
2. Pengadaan alat atau bahan pelajaran.
3. Penyelengaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB.
4. Pengadaan perpustakaan madrasah.
5. Prakarya dan pelajaran praktek.

Dalam perencanaan perlu adanya pengaturan peralatan pengajaran yang diantara lain:

1. Mengatur buku-buku pelajaran untuk siswa.
2. Mengatur perpustakaan madrasah.
3. Mengatur perpustakaan kelas.
4. Mengatur alat-alat laboratorium.

⁵² *Ibid*, h.70

⁵³ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 54

5. Mengatur alat-alat praga untuk tiap-tiap bidang study.
6. Mengatur peralatan pembelajaran keterampilan dan olahraga dan lain-lain.⁵⁴

2. Pelaksanaan(Acounting).

a. Akuntansi (Accounting)

Akutansi adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan konversi (perubahan) sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang bisa di pakai. Oleh karna itu akunting berkaitan dengan mengukur dan menyingkapi hasil dari kegiatan konversi sumber daya. Teknik manajemen yang digunakan adalah MBO (*Management By Objective*). Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan finansial (keuangan) didalam organisasi laba dan nirlaba. Selain pendapat di atas akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Agar penyajian informasi tepat, maka seorang akuntan harus memiliki pengetahuan baik mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntansi disamping itu seorang akuntan harus mengembangkan sistem yang dapat menjamin bahwa semua peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi dapat tercatat dengan mencukupi pada saat yang tepat dengan biaya yang pantas.

Kegiatan akuntansi memerlukan sistem akuntansi yang benar. Didalam sistem akuntansi terdiri dari catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal, buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk staf, sukarelawan dan para profesional. Tujuan sistem akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara

⁵⁴ Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal.54

tepat kedalam catatan akuntansi serta laporan - laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Komponen-komponen sistem akuntansi secara tradisional, sistem akuntansi terdiri dari komponen-komponen berikut :

1. Bagan Perkiraan/Akun

Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, dimana pencatatannya dibagi kedalam lima kategori , yaitu :

- a. Aktiva
- b. Utang
- c. Aktiva bersih
- d. Pendapatan
- e. Belanja.⁵⁵

Masing-masing pencatatan ditentukan dengan mengidentifikasi angka yang diinputkan ke sistem akuntansi.

2. Buku Besar

Buku besar mengklasifikasi informasi pencatatan, dimana bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Dalam sistem manual, ringkasan total dari seluruh jurnal dimasukkan ke dalam buku besar setiap bulannya dimana hal ini dilakukan selama satu tahun dan dilaporkan pada tanggal neraca. Dalam sistem terkomputerisasi, data secara khusus dimasukkan ke sistem sekali saja. Saat entri data telah disetujui oleh pemakai, perangkat lunak memasukkan informasi itu ke seluruh laporan, dimana angka yang dicatat akan muncul.

3. Jurnal

⁵⁵ Abubakar Taufarani C. Kurniatun, *Op. Cit.* h. 265

Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi, sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi, contoh :

- a. Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas adalah suatu pencatatan secara kronologis atau cek yang ditulis, yang dikategorikan menurut bagan perkiraan atau akun.
- b. Jurnal umum mencatat transaksi penerimaan kas adalah pencatatan secara kronologis atas seluruh setoran yang dibuat, yang dikategorikan menurut bagan perkiraan atau akun.
- c. Jurnal umum mencatat transaksi gaji, yaitu jurnal yang mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan penggajian.
- d. Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dan piutang merupakan bagian akun pertambahan biaya dan pendapatan. Jurnal ini bermanfaat untuk mengelompokkan transaksi pertambahan biaya dan atau pendapatan yang terlalu banyak melalui jurnal.

4. Buku Cek

Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, dimana tanda penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran dibuat.

Tabel 1

Siklus Akuntansi

Tahap Pencatatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi kedalam buku harian atau jurnal .3. Memindah bukuan (<i>posting</i>) dari jurnal
------------------	---

	berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar
Tahap pengiktisaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan neraca saldo (<i>trial balance</i>) berdasarkan akun - akun buku besar. 2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian 3. Penyusunan kertas kerja (<i>work sheet</i>) 4. Pembuatan ayat jurnal penutup (<i>closing entries</i>) 5. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan 6. Pembuatan ayat jurnal pembalik.
Tahap pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan surplus defisit/laporan aktiva 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan aktiva bersih 5. Catatan atas laporan keuangan

3. Penilaian (*Auditing*)

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang berkompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria- kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten.

Untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur, informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk.

Dalam auditing data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi tercatat telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi. Oleh karena kriterianya adalah aturan–aturan akuntansi, maka seorang auditor harus memahami aturan–aturan dimaksud dengan baik. Dalam audit laporan keuangan, aturan–aturan yang dimaksud adalah prinsip–prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam sistem akuntansi Indonesia, maka standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

a. Jenis-Jenis Audit:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diferivikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria – kriteria tertentu yang umumnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seringkali juga dilakukan audit keuangan yang disusun berdasarkan pada basis kas akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan lebih efisien mempekerjakan satu orang auditor. Untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat di andalkan oleh semua pihak, dari pada membiarkan masing– masing pihak melakukan audit sendiri - sendiri.

2. Audit Operasional

Audit operasional merupakan hasil penelaahan atas bagian maupun dari prosodur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efesiensi dan efeksitasnya.

Dalam audit operasional tinjauan yang dilakukan tidak sebatas pada masalah-masalah akuntansi tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemampataan komputer dan lainnya sesuai dengan keahlian auditor

3. Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosodur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otorisasi lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga merupakan audit pelaksana akuntansi, apakah telah mengikuti

prosodur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Misalnya perjanjian dengan pihak ke tiga dan memenuhi ketentuan hukum yang lainnya.

B. Standar Pembiayaan Pendidikan

a. Landasan Hukum Standar Pembiayaan Pendidikan

Islam sebagai salah satu ajaran yang menjunjung tinggi masalah pendidikan tentu saja telah memiliki pegangan dan aturan berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, masalah pembiayaan dalam ajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber ajaran Islam yaitu al-Quran, salah satu ayat yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan adalah surah al-Mujadilah ayat 12-13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرِّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan secara tegas bahwa ketika seseorang hendak menuntut ilmu pada suatu lembaga atau guru-guru yang hendak ia datangi untuk belajar suatu ilmu baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum maka ia haruslah mempersiapkan segala keperluan atau dana sebagai bekal ia dalam proses belajar. Begitupun lembaga-lembaga pendidikan atau seperti madrasah, negeri dan swasta

⁵⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an terjemah.

yang menampung siswa di madrasah tersebut harus dapat mengelola danayang terkumpul dari siswa untuk berlangsung suatu lembaga tersebut.

Landasan hukum merupakan dasar dari peraturan yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai alas dan dasar operasional perundang-undangan yang berlaku.

Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab XIII.

- a. Pasal 46 (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- b. Pasal 46 (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. Pasal 46 (3): Ketentuan mengenai tanggungjawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 47 (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- e. Pasal 47 (2): Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pasal 47 (3): Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayt (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 48 (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- h. Pasal 48 (2): Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SNP ini lahir dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ada 8 Standar Nasional Pendidikan yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Penegelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan⁵⁷

Standar pembiayaan merupakan salah satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas disamping standar lainnya.

b. Sumber-Sumber Pembiayaan

Pembiayaan dalam pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 46 tentang sumber pendanaan pendidikan yakni:

1. Pemerintah Pusat, yang bersumber pada APBN, minimal 20 %, yang dialokasikan sebagai dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
2. Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang bersumber pada APBD, minimal 20 %.⁵⁸
3. Masyarakat, yang meliputi sumbangan pendidikan; hibah; wakaf; zakat; pembayaran nadzar; pinjaman; sumbangan perusahaan; keringanan dan penghapusan pajak pendidikan dan penerimaan lain yang sah dan halal.⁵⁹

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek pembiayaan pendidikan hanya sebagai partisipan artinya apabila ada kebutuhan yang tidak terkaper oleh dana BOS atau bantuan dari pemerintah, yang bersifat mendesak dan penting,

⁵⁷ Meni Handayani. *Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di Propinsi DKI Jakarta*. jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol 1, No. 2. Jakarta Pusat : Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Belitang. 2016 h.180 DOI: <https://www.google.com/search?q=jurnal+Landasan+huku+standar+pembiayaan+pendidikan+di+Indonesia>

⁵⁸ Budi Budaya, *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF*, Malang : Universitas Wisnuwardhana , jurnal : 2018 Vol 18, No. 1, h.51 DOI : <https://www.google.com/search?q=JURNALMANAJEMEN+PEMBIAYAAN+PENDIDIKAN+PADA+SEKOLAH+DASAR+YANG+EFEKTIF>

⁵⁹ Ramayulis, *Op Cit*. h. 298-300

maka madrasah yang memiliki komite dapat berperan untuk mencari investor dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan dengan cara-cara yang sah secara hukum.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut:

Menurut supriadi dalam Budi Budaya biaya langsung (*direct cost*) yang meliputi segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara biaya tidak langsung (*indirect cost*) pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di madrasah, seperti biaya transportasi siswa, biaya jajan, biaya kesehatan dan biaya kesempatan (*opportunity cost*)⁶⁰

Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis biaya-biaya yang merupakan bagian dari Biaya langsung (*direct cost*), yaitu:

1. Pertama: Biaya rutin (*recurrent cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil madrasah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Biaya Rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: 1) rata-rata gaji guru per tahun; 2) rasio guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) Biaya Pembangunan (*capital cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mengajar, biaya penggantian dan perbaikan.

⁶⁰Budi Budaya, *Op Cit.*, h.51

2. Kedua: Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*) Menurut Nanang Fatah didalam Budi Budaya, dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (*Earning foregone by students*), bebasnya beban pajak karena sifat madrasah yang tidak mencari laba (*cost of tax exemption*), bebasnya sewa perangkat madrasah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat madrasah yang sudah lama dipergunakan (*implicit rent and depreciation*)⁶¹

Selain itu ada juga jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu: 1) biaya pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya dan termasuk di dalamnya *foregone opportunities*. Dalam kaitan ini, Jones mengatakan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”⁶² Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya pendidikan yang dibayar oleh keluarga atau individu; 2) biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai pendidikan (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini, Thomas, H. J. ones mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs*”.⁶³ Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya pendidikan yang dibayar oleh masyarakat.

⁶¹*Ibid*, h, 51

⁶²*Ibid*, h. 51

⁶³*Ibid*, h, 571

3. Ketiga, Monetary Cost, adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.
4. Keempat. Non Monetary Cost, adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Dep.Dik.Nas 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.⁶⁴

1. Biaya Investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang, lembur, Transportasi, Konsumsi, Pajak, Asuransi, dan lain sebagainya. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan⁶⁵.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 sampai dengan Pasal 30), pendanaan

⁶⁴*Ibid*, h. 573

⁶⁵Meni Handayani. *Op Cit*. h. 184- 185

pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:

1. biaya Investasi satuan Pendidikan , meliputi: a) biaya investasi lahan pendidikan dan b) biaya investasi selain lahan pendidikan;
2. biaya investasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan dan b) biaya investasi selain lahan;
3. biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya non- personalia;
4. biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan,yang meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya nonpersonalia, serta,
5. bantuan biaya pendidikan dan bea- peserta didik.⁶⁶

Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan pendanaan pendidikan erat kaitannya dengan keperluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain:

1. Biaya Operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan);
2. Proses pembelajaran dan penilaian;
3. Pengadaan, perawatan, dan perbaikan/ perawatan sarana- prasarana pendidikan; dan
4. Manajemen.

Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral

⁶⁶*Ibid*, h. 574

dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidak mampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya.⁶⁷

Berdasarkan uraian klasifikasi biaya pendidikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar, bahwa hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan.

d. Realisasi pembiayaan pendidikan di lapangan

Pembiayaan pendidikan di madrasah meliputi biaya-biaya sebagai berikut:

1. Pendapatan Rutin yakni biaya untuk belanja pegawai.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Bantuan-bantuan pemerintah.
4. Pendapatan asli madrasah yakni pendapatan yang diupayakan oleh komite madrasah.

C. Manajemen Pembiayaan di Madrasah

a. Perencanaan (*Budgeting*)

⁶⁷*Ibid*, h. 574

Manajemen keuangan pendidikan yang akan dijadikan kajian disini adalah kajian manajemen satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan madrasah. Setiap madrasah seyogyanya memiliki rencana strategis untuk periode waktu tertentu yang didalamnya mencakup visi, misi dan program serta sasaran tahunan. Oleh karena itu pembiayaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif dengan rencana dimadrasah dan diarahkan untuk ketercapaian tujuan lembaga sebagaimana didokumentasikan.

Perencanaan keuangan madrasah dilakukan dengan madrasah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Perencanaan keuangan madrasah berarti menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan. Perencanaan keuangan madrasah disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Madrasah (RPM) secara keseluruhan, baik pengembangan jangka Pendek maupun jangka Panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan. Berdasarkan (RPM) baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan madrasah, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Disamping memperhatikan program pengembangan madrasah, perencanaan keuangan madrasah juga mengacu pada penyelenggaraan pendidikan dimadrasah secara keseluruhan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2001 tentang pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dimadrasah menyebutkan penyelenggaraan pendidikan dimadrasah meliputi:

1. Pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar, baik

- teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan penilaian hasil belajar.
2. Pelayanan yang bersifat penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
 3. Pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, peralatan laboratorium, alat pelajaran, perpustakaan dan peralatan praktek keterampilan serta bahan praktek laboratorium serta keterampilan.
 4. Pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah, dan lingkungan.
 5. Penyediaan daya dan jasa seperti listrik, gas dan air.
 6. Perjalanan dinas kepala sekolah dan guru.
 7. Pelayanan masyarakat, pemberdayaan Komite Sekolah, kegiatan sosial.
 8. Penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa dan guru.
 9. Penyediaan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar.
 10. Penyediaan gaji Guru dan Non guru, tunjangan, honorarium, lembur, transportasi, insentif, dan lainnya yang menunjang pendidikan⁶⁸

Menurut Imron didalam Imam Gunawan dan Djum Djum noor Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan rencana operasional yang dimiliki sekolah. Memperhatikan sumber pendanaan madrasah umumnya tidak berasal dari satu sumber, pengelolaan keuangan madrasah mencakup: (1). Sumber dana, (2). Alokasi dana, (3). Realisasi pengeluaran, (4). Bukti pengeluarannya.⁶⁹

Sedangkan menurut Utaridalam Imam Gunawan dan Djum Djum Nur bahwa: Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM). Merupakan rencana Biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. Selanjutnya Utari mengemukakan, ketentuan lain dalam penyusunan RKAM yaitu: (1). Menggunakan strategi analisis SWOT (2). Analisis SWOT dilakukan setiap tahun, (3) RKAM merupakan penjabaran dari RKM, (4). Program yang direncanakan bersifat lebih operasional, (5). Ada benang merah antara tujuan jangka menengah dan sasaran satu tahunan, (6). Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT.⁷⁰

⁶⁸Imam Gunawan & Djum Djum Noor B, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 363

⁶⁹,*ibid* h.368

⁷⁰*Ibid.* h. 368

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Asas-asas penyusunan RKAM

Penyusunan RKAM perlu memperhatikan asas anggaran yaitu:

1. Asas kecermatan
Anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan
2. Asas terinci
Penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan
3. Asas keseluruhan
Anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran
4. Asas keterbukaan
Semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan madrasah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya.
5. Asas Periodik
Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas
6. Asas pembebanan
Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan perlu diperhatikan secara baik.⁷¹

2. Prinsip-Prinsip penyusunan RKAM

Prinsip penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) adalah:

1. Fokus pada peningkatan pembelajaran siswa, yang dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.
2. Harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas serta di pajang di tempat terbuka di madrasah.
3. Madrasah sebaiknya dengan seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan RPM.

3. Proses penyusunan RKAM

⁷¹Ibid, h. 368

1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan Madrasah.
2. Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya.
3. Menyelesaikan analisis kebutuhan
4. Memprioritaskan kebutuhan
5. Mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/ dipaparkan dalam RPM.
6. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan.
7. Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, dan pelaporan) dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi.⁷²

4. Langkah-langkah Penyusunan RKAM

1. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan/ pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya, dan masukan dari seluruh warga madrasah maupun komite madrasah.
2. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan.
3. Menyusun Rencana Kegiatan Madrasah (RKM) yang terlengkap berdasarkan langkah poin 1 dan 2 disini kepala madrasah membuat tabel RKM yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Tabel tersebut diisi sesuai kolom yang ada.
4. Penyusunan RKAM Kepala madrasah membuat tabel RKAM yang

⁷²*Ibid*, h. 369

terdiri dari kolom-kolom yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut didisi dan ditanda tangani oleh kepala madrasah dan Ketua Komite madrasah dan diketahui oleh kepala dinas setempat.

5. Alokasi keuangan madrasah

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab IX pasal 62 pasal 1 menyatakan pembiayaan pendidikan terdiri atas *Biaya Investasi*, *Biaya Operasional*, dan *Biaya Personal*.

- a. Biaya Investasi: Satuan pendidikan meliputi: biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia SDM dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Operasi: Satuan pendidikan meliputi: 1. Gaji pendidik, dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.
- c. Biaya Personal: Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transportasi, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya⁷³.

⁷³Meni Handayani, *Op Cit.* h. 185

Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional madrasah mengatur.

1. Sumber pemasukan dan pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.
2. Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana diluar dana investasi dan operasional.
3. Kewenangan dan tanggung jawab kepala madrasah dalam pembelanjaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
4. Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite madrasah serta institusi di atasnya.⁷⁴

b. Pelaksanaan (*Accounting*)

1. Pembelanjaan keuangan Madrasah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Direktorat tenaga Kependidikan menyatakan mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan harus menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Selanjutnya direktorat tenaga kependidikan menyatakan bendaharawan madrasah dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal ini.

⁷⁴Imam Gunawan & Djum Djum Noor B, *Op., Cit*, h. 372

1. Hemat sesuai dengan kebutuhan
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
3. Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar.

Pelaksanaan pengeluaran anggran di madrasah disesuaikan dengan sumbernya. Contoh penggunaan anggaran rutin madrasah

Tabel 2
Contoh Anggaran Rutin

Mata Anggaran	Kode
Gaji dan tunjangan	MTs. 5110
Tunjangan beras	MTs. 5110
Uang lembur	MTs. 5110
Keperluan sehari-hari kantor	MTs. 5110
Inventaris kantor	MTs. 5110
Langgana daya dan jasa	MTs. 5110
ATK	MTs. 5110
Lain-lain	MTs. 5110

1. Pembukuan Keuangan Madrasah

Penerimaan maupun pengeluaran keuangan madrasah harus dilakukan seara tertib, teratur dan benar hal ini dimaksudkan agar penggunaan keuangan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat dibuat laporan pertanggung jawaban yang akuntabel. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang madrasah harus dicatat oleh bendahara madrasah dalam Buku Kas Umum BKU dan Buku Kas Pembantu BKP. BKU adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan.

Ada pun prinsip pembukuan meliputi:

1. Penerimaan dan pengeluaran keuangan tercatat secara tertib, disertai dengan bukti tertulis sesuai aturan yang berlaku
2. Pencatatan dilakuka setiap ada transaksi
3. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan atau dengan menggunakan komputer
4. Pembukuan yang dilakukan dengan komputer bendahara harus

menetak buku kas umum dan buku kas pembantu sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan menata usahakan hasil cetakan BKU dan buku bulanan setelah ditanda tangani kepala sekolah dan bendahara madrasah.

5. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal transaksi
6. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan Kwitansi yang sah.

Tabel 3
Contoh Buku Kas Umum

No	Tanggal	Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	06-02-2019		Diambil dana BOS dari bank untuk dibayarkan ke toko bangunan	5.000.000	2.5000.000	2.500.000
Jumlah						

Tabel 4
Contoh Buku Kas Pembantu

No	Tanggal	No Kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	06-02-2019	M.a5110	012	Biaya bangunan	5.000.000	2.500.000	2.500.000
Jumlah							

c. Penilaian (*Auditing*)

Pada pelaksanaan Audit atas laporan keuangan, operasional dan ketaatan dapat dilakukan oleh internal maupun eksternal. Sekaligus berperan sebagai pengawasan dalam proses pelaksanaan pembiayaan serta laporan pertanggung jawaban.

Penilaian/ Pengawasan keuangan merupakan kegiatan yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan madrasah. Pengawasan keuangan di madrasah dilakukan oleh kepala madrasah dan instansi vertikal di atasnya.

Sedangkan dalam pandangan Islam Pengawasan sering disebut dengan kata Ar-Riqabah, adalah pengamatan dan penelitian terhadap jalannya Perencanaan. Dalam pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan harus lebih baik dari anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif.

Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat diatas peringatan untuk orang-orang yang lalai dalam menjaga amanah yang disandang, apabila ia seorang pemimpin maka jadilah pemimpin yang adil, jujur, memanfaatkan kedudukan untuk ladang pahala.

Adapun menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Kegiatan Pengawasan keuangan madrasah dilakukan dengan maksud untuk mengetahui:

1. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah diterapkan dan dengan prosedur yang berlaku,
2. Kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan,

3. Kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif.
4. Sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Pengawasan keuangan madrasah bertujuan untuk menjaga dan mendorong agar:

1. Pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan intruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
3. Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi, dan
4. Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya.⁷⁵

Setelah proses penilaian dilakukan oleh tim Audit dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, maka kegiatan selanjutnya adalah Laporan Pertanggung Jawaban ketua Yayasan atau Lembaga terkait.

Laporan Pertanggungjawaban keuangan madrasah harus dibukukan secara terperinci. Semua keuangan yang masuk dan keluar harus diperinci secara mendetail. Dalam pelaporan pertanggungjawaban harus dilampirkan juga bukti-bukti pengeluaran, baik berupa kwitansi maupun bon pembelian secara lengkap dan jelas. Laporan pertanggung jawaban keuangan madrasah dibuat oleh bendahara madrasah yang berisi uraian penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah. Pertanggungjawaban keuangan madrasah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada instansi yang berwenang.
2. Kelengkapan lampiran SPJ:
 - a. Surat pengantar

⁷⁵Fauzan, *Op Cit.*, h. 92

- b. Buku kas umum
- c. Daftar penerimaan dan pengeluaran perkomponen
- d. Laporan keadaan kas rutin/pembangunan
- e. Register penutupan kas setiap 3 bulan sekali
- f. Fotocopy rekening koran dari bank yang ditunjuk
- g. Daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak
- h. Bukti setor ppn/pph
- i. Bukti pengeluaran/kwitansi asli beserta bukti pendukung lainnya.⁷⁶

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh DR. Matua D. Phylisters (*PhD*), DR. Angeline Sabina Mulwa (*PhD*), DR. Dorothy Ndunge Kyalo (*PhD*) dengan judul penelitian: *Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya* Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di sekolah menengah, adapun fokus penelitian ini pada pengaruh peatihan kepala sekolah dan manajemen keuangan dalam tingkat pendidikan, adapun hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dengan manajemen keuangan dan peran kepala sekolah yang sangat berpengalaman dan ditunjang untuk menjadi kepala sekolah yang berpengalaman sehingga memepengaruhi efektifitas manajemen keuangan sekolah dan fasilitas fisik sekolah⁷⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dading Murni Anggra ini dengan judul penelitian: *Analysis of Education Financing Management (Multi Case in SMPN 1 and SMP N 3 Pringgabaya)* tahun 2019, adapun hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dengan analisis manajemen pendanaan dapat menentukan jumlah alokasi setiap jenis pengeluaran, menyusun RKAM, identifikasi sumber pendapatan madrasah, implementasi pendanaan keluar dan masuk dana dalam tahap 1 bulan dan evaluasi.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid* h. 92

⁷⁷ Matua D. Phylisters *dkk. Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya. International Journal of Education and Research. Vol. 6 no 11. 2018 h. 2 DOI : <http://www.ijern.com>*

⁷⁸ Dading Murni Anggraini. *Analysis of Education Financing Management (Multi*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rifiani, Joko Widodo, Kardoyo, Haryono dengan ,judul penelitian: THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT MODEL FORSCHOOL-BASED 9-YEAR BASIC EDUCATION LEARNING OBLIGATIONIN KABUPATEN KUDUS tahun 2016. Adapun tujuannya untuk mengembangkan model manajemen keuangan dasar 9 tahun berbasis wajib belajar pendidikan,dengan diimplementasikannya manajemen keuangan melalui tahapan proses penganggaran dana untuk prestasi siswa , sumber dana BOS, pemerintahan setempat, pengawasan dan pertanggung jawaban.⁷⁹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Husin, Yahya Don dkk. Judul Penelitian:Identifying the Level of School Financial Management amongPrimary School Headmaster: A Case Study in the State of Kedah and Perlis, Malaysiatahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pengalaman menjadi kepala sekoah , tingkat pendidikan dan kursus keungan menentukan pengetahuan kepala sekolah dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Maksudnya manajemen keuangan dan semua masalah keuangan di pertanggung jawabkan oleh kepala sekolah..⁸⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Lamatenggo, Ayu Anggraini Rosadi. Judul penelitian: Transparency of Financing Management Education in High School tahun 2018. Berdasarkan hasil peneliti bahwa Perencanaan, anggaran penganggaran manajemen , implementasi pendidikan program anggaran menengah dan tranparansi anggaran di gorontalo di katagorikan baik.

Case in SMPN 1 and SMPN3Pringgabaya).International Journal of Multiculturaland Multireligious Understanding.*University of Mataram* : 2019h. 206 DOI : <http://jurnal.dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i6.923>

⁷⁹ Yuli Rifiani, Joko Widodo dkk. *THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT MODEL FORSCHOOL-BASED 9-YEAR BASIC EDUCATION LEARNING OBLIGATIONIN KABUPATEN KUDUS*.The Journal of Educational Development. Uneversitas Negeri Semarang : Indonesia. 2016 h. 175 DOI : <http://journal.unnes.ac.id>

⁸⁰ Fauzi Husin, Yahya Don dkk. *Identifying the Level of School Financial Management amongPrimary School Headmaster: A Case Study in the State of Kedah and Perlis, Malaysia*University Utara MalaysiaSintok, Kedah Malaysia. : Asian Journal of Education and e-Learnin. Vol 03. 2015. h. 382 DOI : www.ajouronline.com

Pengaruh yang diberikan oleh manajemen pembiayaan terhadap pendidikan

SMA kota Gorontalo berada pada kategori kokoh.⁸¹

Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah metode penelitiannya, adapun metode penelitian terdahulu peneliti terangkan sebagai berikut :

1. Menggunakan metode penelitian deskriptif.
2. Mendeskripsikan tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. wawancara , observasi dan teknik dokumentasi.
3. Pendekatan penelitian dan pengembangan.
4. Wawancara , observasi dan dokumen.
5. Kuantitatif tipe deskriptif eksplanatori, kuisisioner,wawancara, dokumentasi.

Dan adapun metode penelitian yang akan peneliti lakukan

sifatnya deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi.

E. Kerangka Berpikir

Pada undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara⁸².

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu system terencana untuk menciptakan manusia seutuhnya. Sistem pendidikan memiliki garapan dasar yang dikembangkan sebagaimana dikemukakan oleh B. Suryosubroto garapan manajemen pendidikan adalah:

1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen kesiswaan
3. Manajemen personalia
4. Manajemen sarana pendidikan

⁸¹ Nina Lamatenggo, Ayu Anggraini Rosadi. *Transparency of Financing Management Education in High School*. International Journal of Innovative Science and Research Technology. Vol 3. Educational Management Department, Faculty of Education Gorontalo State University. 2018 h. 99 DOI : <https://ijisrt.com>

⁸² B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta .2010 , Cet ke 2), h.30

5. Manajemen tatalaksana sekolah
6. Manajemen keuangan
7. Pengorganisasian sekolah
8. Hubungan sekolah dengan masyarakat.⁸³

Yang menjadi definisi konsep manajemen keuangan adalah:

Hendri Fayol mengemukakan bahwa tugas – tugas pokok pimpinan itu setelah diterjemahkan terdiri atas: merencanakan (*to plan*), mengorganisasikan (*to organize*), menggerakkan (*to command*), mengkoordinasikan (*to coordinate*) mengendalikan (*to control*). 2. Luther Gulick mengemukakan konsepnya dalam POSDICORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*).⁸⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan sebuah proses kegiatan atau aktivitas yang terorganisir untuk mengelola sumber daya, peluang dengan pendekatan ilmiah secara sistematis untuk menentukan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan suatu alat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya yang menyangkut dengan masalah keuangan.

Keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seluk beluk uang, urusan uang, keadaan keuangan⁸⁵

Menurut Depdiknas bahwa manajemen pembiayaan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan, keuangan yang meliputi: pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan⁸⁶

Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi–fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana.⁸⁷

R. Agus Sartono menyatakan manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi

⁸³ *Ibid*, h 30

⁸⁴ *Ibid*, h, 9

⁸⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 193

⁸⁶ Depdiknas, *Undang Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Tamita Utama, 2003), h. 525

⁸⁷ Abubakar dan Taufani C. Kurniatun, *Op Cit*. h.256

secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.⁸⁸

Dari pendapat yang telah diuraikan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan segala pengurusan yang berkaitan dengan anggaran, mulai dari system perencanaan/ sumber dana, pengalokasian anggaran, system implementasi anggaran, metode monitoring dan evaluasi serta pelaporan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran.

Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai dengan efektif dan efisien maka perlu memfungsikan manajemen pembiayaan itu sendiri dengan baik.

Manajemen pendidikan memiliki 3 (tiga) tahapan penting antara lain:

1. Perencanaan (*Budguting*)
2. Pelaksanaan(*Accounting*)
3. Penilaian (*Evaluasi*)⁸⁹

Ketiga tahapan manajemen pendidikan diatas apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Budgeting*).
2. Pelaksanaan (*Accounting*).
3. Penilaian (*Auditing*).⁹⁰

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁸⁸ R. AgusSartono ,*Op Cit.*, h.6

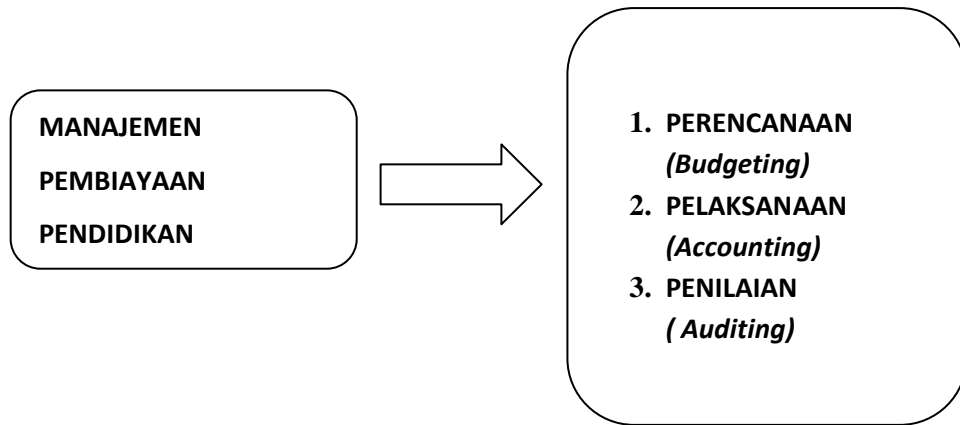
⁸⁹ Partiwiningsih Utami. *Manajemen Pembiayaan Disekolah Pertama Negeri I Anjong.*

Untan Pontianak : Jurnal manajmen Pembiayaan. h. 1. 2016 DOI :

<https://www.google.com/search?qJURNAL=MANAJEMEN+PEMBIAYAAN+DI+SELAH+M+ENENGAH>

⁹⁰ Ramayulis dan Mulyadi,. *Op Cit* h. 109

Gambar 1
MANAJEMEN PEMBIAYAAN:



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, dan Taufani C. Kurniatun. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Amirudin. *Manajemen Pendidikan Islam Persepektif Filsafat Ilmu dan Al-qur'an*. Ijtimayya. Vol.6. No.2.2017 DOI:<https://jurnal.neliti.com>
- Anggraini, Dading Murni. *Analysis of Education Financing Management(Multi Case in SMPN 1 and SMPN3Pringgabaya)*. International Journal of Multiculturaland Multireligious Understanding. University of Mataram 2019 DOI: <http://jurnal dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i6.923>
- Anis, Muhammad.*ManajemenPembiayaanPendidikan Di SDIT*. Tesis : Ungaran, 2013.
- Aiedi, Nur.*Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Gosyen publishing, 2015.
- Atmodiwiro, Soebagia. *Pendidikan Agama untuk membangun Etika Sosial Mendidik Anak Sukses Masa Depan Pandaidan Bermanfaat*. Semarang : Aneka Ilmu, 2003.
- Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar, JurnalAdministrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 1, No.2, November 2012.
- Budaya , Budi. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF*. Malang : Universitas Wisnuwardhana : jurnal, Vol 18, No. 1, 2018 DOI:<https://www.google.com/search?q=JURNAL MANAJEMEN+PEMBIAYAAN+PENDIDIKAN+PADA+SEKOLAH+DASAR+YANG+EFEKTIF>
- Burhanuddin. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Depdiknas, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tamita Utama, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Depdiknas, *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasiona*. Jakarta: Tamita Utama. 2003
- Dep.dik.nas. Didasmen TK dan SD. *Manajemen Berbasis Sekolah untuk Sekolah Dasar*. Jakarta : Depdiknas, 2001
- Departemen Agama RI. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata*. Cempaka Putih: Kalim 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an* terjemah.
- Dokumen Profil Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Tahun 2019/2020
- DjumDjum, Noor B & Imam Gunawan. *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung : afabeta, 2017

- Effendy, Mochtar. *Ek.Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986
- Enny,Pudjiastuti dan Suad Hasan,*Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta :UUp AMP YKPN, 1998
- Fatah,Nanang.*Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PTRemaja Rosdakarya, 2002
- Fatah, Nanang. *Landasan Manjemen Pendidikan Cet.7* .Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Fauzan. *Pengantar Sitem Administrasi Pendidikan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta : UII Press, 2016
- Hallak,J, (terj.Harso). *Analisis Biaya & Pengeluaran untuk pendidikan*. Paris :Bharata Karya Asara, Jakarta danUnesco, 1985
- Hadi, Sutrisno.*Metodologi Research JilidII*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998
- Handayani, Meni. *Pencapaian Standar Nasiona Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di Propinsi DKI Jakarta*. jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol 1, No. 2.jakarta Pusat : Pusat penetian Kebijakan Penidikan dan Kebudayaan Belitang.2016 DOI: [=jurnal+Landasan+huku+standar+pembiayaan+pendidikan+di+Indonesia](https://doi.org/10.24054/edukatif.v1i2.1000)
- Ismanto, Bambang. *Pengembangan model pengelolaan anggaran sekolah berbasis partisipasi*. Jurnal widiyasari : model anggaran sekolah parstisipasi.2017 DOI:<https://www.google.com/search?q=JURNAL+WIDYA+SARI+PENGEMBANGAN+MODEL+PENGELOLAAN+ANGGARAN+SEKOLAH+BERBASIS+PARTISIPASI>
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Translit&Trejemah*.Ciputat: Cipta Bagus Segara. 2011.
- Komariah ,Nur.*Implementasi Sumber Pendidikan* : ejournal, Vol XVI, 2018 DOI : <https://ejournal.bs>
- Komar , Muzammil.*Manajemen Pendidikan Islam*: Malang : Erlangga, 2007
- Kurniatun, Abubakar, Taufani C.*Manajemen Keuangan Pendidikan*. Bandung. Alfabeta, 2013
- Mardalis.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Masditau.*MANAJEMEN PENDIDIKAN MANUJU PENDIDIKAN YANG BERMUTU*. Medan : POLTEKPAR,jurnal ANSIRU PAI, Vol. 1 No.2. 2017 DOI:<https://www.google.com/search?q=JURNALMANAJEMEN+PEMBIAYAAN+PENDIDIKAN+ME+NUJU+PENDIDIKAN+YANG+BERMUTU>
- Mulyadi, danRamayulis. *MANAJEMEN & KEPEMIMPINAN Pendidikan Islam*. jakarta : Kalam Mulia, 2017
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah,Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mulyasa E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* ,(Bandung:Remaja Rosda karya,2007.
- Mohammad Jauhar dan Nur Hamiyah.*Pengantar Manajemen Pendidikan Disekolah*.Jakarta:Prestasi Pustaka, 2015
- Moleong , Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Fatah, Nanang. *Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1998
- Fatah ,Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bai Quraisy,2007
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*.Jakarta :kalammulia,2016
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998
- Observasi dan wawancara, kepada hafid maulana Kepala MTs Mathla'ulAnwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 09.00 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 24 Desember 2019
- Observasi dan Wawancara, Kepada Hafid maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 24 Desember 2019
- Observasi, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 11.00 WIB di ruang Kantor Madrasah , tgl. 24 Desember 2019
- Phylisters, Matua D. (PhD,) dkk.*Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice throughCompetency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya*.International Journal of Educationand Research. Vol.6 No11.2018DOI:<http://www.ijern.com>
- Qomar, Mujamil.*ManajemenPendidikan Islam*.Jakarta: Erlangga, 2007
- Ramayulis, *IlmuPendidikan Islam*.Jakarta:KalamMulia, 2002
- Rahmat , Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. EQUILIBRUM, Vol. 5, No. 9 : 2009. DOI :<http://yusuf.staff.ub.ac.id>
- Rosadi, Ayu Anggraini i,Nina Lamatenggo. *Transparency of Financing Management Education inHigh School*. International Journal of Innovative Science and Research Technology. Vol 3. Educational Management Department, Faculty of EducatiGorontalo State University.2018 DOI :<https://ijisrt.com>
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan TeoridanAplikasi*.Yogyakarta: FE UGM, 2000
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras,2009
- Sumidjo,Wahyu.*Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002

Sunedi dkk, *Manajemen Pembiayaan Bersumber dari Masyarakat*. Jurnal: FENOMENA, Volume 9. Nomor 1, 2017 DOI: <https://www.google.com/search?qJurnal=Manajemen+Pembiayaan+Pendidikan+Bersumber+dari+Masyarakat>

Sikardi , Dewa Ketut. *Analisis Tes Psikologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003

Singestecia , Regina dkk. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*.jurnal, Vol. 2 No. 1. Semarang : 2018 .DOI: <https://journal.unnes.ac.id>

Sonedi. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangaraya, Vol. 9 No.1 2017

Sonhaji, Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003.

Suryosubroto , B. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: RinekaCipta, 2010

SyahIndar,Djumberan. *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Katya Abditama, 1995

Undang-Undang No.20 tahun 2003 bab XIII pasal 46 ayat1 tentang Tanggung Jawab Pendanaan

Undang Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006

Umar, Husain, *Riset Sumber Daya Organisasi*. jakarta : gramedia pustaka utama, 2006

Utami, Partiwingsih. *Manajemen Pembiayaan Disekolah Pertama Negeri 1 Anjong. Untan Pontianak* : Jurnal manajemen Pembiayaan..2016 DOI: <https://www.google.com/search?qJURNAL=MANAJEMEN+PEMBIAYAAN+DI+SEKOLAH+MENENG+AH>

Wawancara, Hafid Maulana Kepala Madrasah/ MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari 2020

Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala Madrasah/ MTs Mathla'ulAnwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari 2020

Wawancara dengan Ruly Yanto ,Waka Bidang Kesiswaan MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Pesawaran, diruang guru, pada pukul 09.45 WIB tanggal 04 Juli 2020

Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah, tgl. 07 januari 2020

Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong, Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari 2020

Wawancara dengan Maryanah, Bendahara MTs Mathla'ul Anwar Kedondong Peawaran ,pada pukul 09 00 WIB tanggal 04 Juli 2020.

- Wawancara dengan Maryanah, Bendahara MTs Mathla'ul Anwar Kedondong
Pesawaran, pada pukul 09 00 WIB tanggal 04 Juli 2020
- Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong,
Pesawaran Pada Pukul 15.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari
2020.
- Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong,
Pesawaran Pada Pukul 11.00 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 24 Desember
2019
- Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong,
Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari
2020.
- Wawancara, Kepada Hafid Maulana Kepala MTs Mathla'ul Anwar Kedondong,
Pesawaran Pada Pukul 13.30 WIB di ruang Kepala Madrasah , tgl. 07 januari
2020
- Wawancara dengan Ruly Yanto , Waka Bidang Kesiswaan MTs Mathla'ul Anwar
Kedondong Pesawaran, di ruang guru, pada pukul 09.45 WIB tanggal 04 Juli 2020.
- Wawancara, Kepada hafid maulana selaku kepala madrasah, pada pukul 14.49 WIB
Tanggal 13 juli 2020
- W.W , Mc. Mahon. *Improving Education Finance in Indonesia*. Jakarta : Policy Research
Center, Institute for Research and Development, MONE, UNICEP, UNISCO, 2001
- W , Manca. *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif, dan Manajemen Pendidikan*,
Malang : Wineka Media, 2004.
- Widodo, Joko Yuli Rifiani, dkk. *THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL
MANAGEMENT MODEL FOR SCHOOL-BASED 9-YEAR BASIC EDUCATION
LEARNING OBLIGATION IN KABUPATEN KUDUS*. The Journal of Educational
Development. Universitas Negeri Semarang : Indonesia. 2016 DOI :
<http://journal.unnes.ac.id>
- Yahya Don, Fauzi Husin dkk. *Identifying the Level of School Financial Management
among Primary School Headmaster: A Case Study in the State of Kedah and
Perlis, Malaysia*. University Utara Malaysia Sintok, Kedah Malaysia. : Asian
Journal of Education and e-Learning. Vol 03. 2015. DOI : Asian Online Journals
(www.ajournalonline.com)
- Yaqin, Hasnul. *Kapita Selekta Administrasi dan Manajemen Pendidikan*,
Banjarmasin: Cet.II, Antasari Press, 2011
- Yusuf, A. Muri. *Metodelogi Penelitian kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*
cet ke 4. Jakarta : Kencana. 2017